

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi pada masyarakat di era globalisasi menjadi sangat penting peranannya bagi setiap orang. Keterbukaan informasi itu sendiri termasuk dalam karakteristik *good governance* menurut UNDP 1997, karakteristik *good governance* itu sendiri meliputi *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness and Efficiency, Accountability, and Strategic Vision*. (Mardiasmo, 2002 : 18)

Keterbukaan informasi juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan informasi publik menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik

lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kemajuan teknologi di era globalisasi telah dimanfaatkan di berbagai aspek seperti di bidang ekonomi, baik dalam aspek penjualan, pembelian, pemasaran, penganggaran, dan lainnya. Pemanfaatan teknologi internet turut dikembangkan dalam melaksanakan pengungkapan atau keterbukaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui media internet dalam bentuk file yang disematkan di *website* pemerintah daerah.

Kemajuan ini tidak lepas dari pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa empat provinsi yang mempunyai indeks pembangunan TIK yang tinggi semuanya ada di Pulau Jawa, lebih tinggi dari IP-TIK Indonesia dan sebaliknya lima provinsi terendah ada di Indonesia bagian Timur. (Agahari, 2018).

Dengan data tersebut menunjukkan bahwa Pulau Jawa memiliki daerah-daerah dengan indeks pembangunan teknologi informasi yang tinggi, dan sudah banyaknya pemerintahan daerah di sejumlah provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jogjakarta, Jawa Barat, dan lainnya sudah menerapkan sistem *e-Government* jauh lebih baik dibandingkan kementerian maupun lembaga di pemerintah pusat. (Bayu, 2016).

Serta menurut survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (AJPII) tahun 2017, pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa dari 262 juta jiwa yang ada di Indonesia. Pulau Jawa menjadi pulau dengan penduduk yang paling banyak menggunakan jasa internet yaitu sebanyak

58,08 %. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Pulau Jawa lah, Pulau dengan pengguna internet terbanyak di Indonesia. Dengan data dari hasil survey tersebut dapat menggambarkan bahwa Pulau Jawa menjadi pusat penggunaan internet, dan pembangunan TIK yang tinggi sehingga kemajuan itu dapat mendukung jalannya penerapan *e-Government* di Pulau Jawa.

Berdasarkan fenomena-fenomena kemajuan teknologi informasi yang telah dijelaskan, di Pulau Jawa masih banyak pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota yang belum memanfaatkan kemajuan teknologi informasi berupa internet tersebut. Dari fakta tersebut, penelitian ini akan membahas beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan data yang ada di *website* pemerintah daerah. Meliputi Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Finansial, Pendapatan Perkapita Daerah, dan *Leverage*.

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar pemerintahan daerah. Dengan jumlah aset/pegawai/ produktifitas yang lebih besar sehingga diharapkan memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada daerah yang lebih kecil (Patrick ,2007). Jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, menggambarkan seberapa besar ukuran perusahaan tersebut (Puspita dan Martani, 2012). Semakin besar ukuran pemerintahan daerah akan lebih kompleks dalam pelaporan keuangannya, maka dari itu laporan keuangan harus dilaporkan untuk mengurangi kecurangan atau kejanggalan dari informasi tersebut (Trisnawati and Achmad, 2014).

Penelitian sebelumnya tentang Ukuran Pemerintah Daerah. Penelitian Nosihana (2016) tentang *Internet Financial Reporting* dan Faktor-Faktor

yang Mempengaruhinya. Mendapatkan hasil bahwa Ukuran Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap publikasi laporan keuangan. Selanjutnya dalam penelitian Achmad (2014), tentang Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. Mendapatkan hasil bahwa, Ukuran pemda memiliki pengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Sedangkan penelitian dari Ikhlas Wau (2015) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan dan Ketersediaan *Internet Financial Reporting* oleh Pemerintah Daerah. Membuktikan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap keteraksesan *IFR* pada *website* pemerintah daerah.

Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal. Rasio Kemandirian Finansial juga dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, bahwa semakin tinggi rasio kemandirian finansial maka semakin tinggi partisipasi masyarakat. (Halim, 2002:128)

Penelitian sebelumnya tentang Rasio Kemandirian Finansial. Dalam penelitian Medina (2012) hasil penelitian bahwa Kemandirian Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Selanjutnya dari penelitian Wau (2015) mendapatkan hasil bahwa, rasio kemandirian finansial pemda (INDEP) berpengaruh positif terhadap keteraksesan *IFR*. Terakhir penelitian dari Idris,

Dkk (2018) menndapatkan hasil bahwa rasio kemandirian finansial tidak berpengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan di *website* Pemerintah daerah.

Dalam level regional atau daerah, ada Produk Domestik Regional Bruto (PDB) yang mengukur jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh ekonomi dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. (Supartoyo dkk, 2013). Menurut penelitian Wau (2015), pendapatan per kapita merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Hal ini juga dapat digunakan sebagai ukuran dari tingkat produktivitas masyarakat.

Penelitian sebelumnya tentang Pendapatan Perkapita, pertama dalam pnelitian Wau (2015) mendapatkan hasil bahwa Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap ketersediaan laporan pada *website* pemerintah daerah. Lalu penelitian dari Wicaksono (2016) bahwa Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh terhadap ketersediaan laporan pada *website* pemerintah daerah. Dan terakhir penelitian dari Perez, dkk (2014) bahwa Pendapatan Perkapita berpengaruh terhadap ketersediaan laporan pada *website* pemerintah daerah.

Leverage merupakan kemampuan pemerintah dalam menjamin dana yang dipinjamnya dalam memberikan pelayanan dan program-program bagi masyarakat, baik untuk sekarang dan di masa yang akan datang (Nosihana, 2016).

Penelitian sebelumnya tentang *Leverage*, penelitian dari Wicaksono (2016) mendapatkan hasil bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap ketersediaan laporan di *website* pemerintah daerah. Lalu dalam penelitian Achmad (2014) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap ketersediaan laporan pada *website* resmi pemerintah daerah. Terakhir Penelitian dari Nosihana (2016) bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap ketersediaan laporan di *website* pemerintah daerah.

Dengan mengamati penelitian sebelumnya tersebut dapat di indikasikan bahwa terdapat fenomena pengaruh dari Ukuran pemerintah daerah, Rasio kemandirian finansial, Pendapatan perkapita, dan *Leverage* terhadap Ketersediaan data informasi keuangan daerah di *Website* Pemda.

Berdasarkan fenomena yang ada, peneliti akan menggunakan populasi pemerintah daerah se-Pulau Jawa lima tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2013 sampai 2017. Hal itu karena populasi di Pulau Jawa lah pulau dengan daerah-daerah yang sudah banyak menerapkan *e-Government*, memiliki indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang baik, dan pulau dengan pengguna jasa internet terbanyak di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini menggunakan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Finansial, Pendapatan Perkapita, Dan *Leverage* Terhadap Ketersediaan Informasi Keuangan Daerah Di *Website* Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah se-Pulau Jawa Tahun Anggaran 2013 - 2017)

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Nosihana (2016) tentang Internet Financial Reporting dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Pada

Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. Alasan mereplikasi penelitian Nosihana adalah dalam keterbatasan penelitian Nosihana, disebutkan bahwa masih rendahnya kemampuan variabel independen yang digunakan dalam penelitian Nosihana dalam memengaruhi variabel dependen yang diuji. Dan Nosihana menyarankan agar menggunakan variabel-variabel yang lain.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nosihana (2016), adalah peneliti menghilangkan variabel kompetisi politik, opini audit dan tipe pemda dari penelitian tersebut dan menambahkan variabel rasio kemandirian finansial dengan alasan menurut peneliti variabel kompetisi politik tidak perlu di teliti karena sudah terbukti berpengaruh di tiga penelitian sebelumnya. Opini audit juga sudah terbukti tidak berpegaruh di tiga penelitian sebelumnya, dan tipe pemda yang jarang dilakukan penelitian sehingga jarang adanya acuan untuk meneliti variabel tersebut. Penelitian ini menambahkan variabel *Leverage* karena disini masih terjadi ketimpangan dalam penelitian antara penelitian. Serta Variabel Rasio Kemandirian Finansial karena juga masih terjadi ketimpangan.

Perbedaan lainnya terdapat pada pengambilan populasi penelitian ini yang menggunakan populasi Pemerintah Daerah se-Pulau Jawa pada tahun anggaran 2013 dan 2017 karena Pulau Jawa menjadi Pulau dengan daerah-daerah yang memiliki indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi, dengan populasi pengguna internet terbanyak di Indonesia dan sudah banyaknya pemda yang sudah menerapkan *e-Government di Pulau Jawa*.

Alasan peneliti mengangkat judul ini adalah karena isu tentang *e-Government* ini termasuk masih hangat untuk di teliti walaupun isu ini sudah muncul di tahun 90 an, dan karena masih ada pemda yang belum mengungkapkan informasi melalui *website* dan bahkan *websitenya* pun masih belum bisa di akses. Penelitian ini diharapkan bisa memotivasi pemerintah daerah agar memperbaiki kinerjanya serta melakukan transparansi dan akuntabilitas publik.

B. Batasan Masalah

Batasan penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti variabel x tentang Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Finansial, Pendapatan Perkapita Daerah, dan *Leverage*. Dan variabel y tentang ketersediaan informasi keuangan pemerintah daerah di *website* pemda. Serta lokasi penelitian ini adalah pada Pemerintahan Daerah se-Jawa saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pemerintahan daerah di *website* ?
2. Apakah Rasio Kemandirian Finansial berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pemerintahan daerah di *website* ?
3. Apakah Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pemerintahan daerah di *website* ?

4. Apakah *Leverage* berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi keuangan pemerintahan daerah di *website* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif Ukuran Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan informasi keuangan pemerintahan daerah di *website*.
2. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif Rasio Kemandirian Finansial terhadap ketersediaan informasi keuangan pemerintahan daerah di *website*.
3. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif Pendapatan Perkapita terhadap ketersediaan informasi keuangan pemerintahan daerah di *website*.
4. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh positif *Leverage* terhadap ketersediaan informasi keuangan pemerintahan daerah di *website*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah, Penelitian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong masyarakat agar meminta pemerintah

daerah agar dapat memberikan informasi tentang kegiatan, pelaporan keuangan pemerintahan daerah, dan lainnya sehingga dapat mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan publik.

2. Bagi Pemerintahan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk membantu pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasinya melalui *e-Government* tersebut.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang mungkin diperlukan untuk mendukung penelitiannya.

